



MEMBANGUN KESADARAN HUKUM SISWA MELALUI EDUKASI TENTANG PENERAPAN HUKUM SANKSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI SMA CENDRAWASIH 1 JAKARTA

Mukhlis, Tasya Berliana Chintya, Riski Septiawan,
Mohamad Mahendra Ryowijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

muchlis@stih-adhyaksa.ac.id
tasya.chintya@stih-adhyaksa.ac.id
riski.septiawan@stih-adhyaksa.ac.id
mryowijaya@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Edukasi hukum merupakan upaya preventif yang penting untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, terutama di lingkungan sekolah sebagai bagian dari masyarakat pendidikan. Salah satu materi yang perlu dipahami oleh siswa SMA adalah penerapan hukum sanksi dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah, yang berfungsi menjaga ketertiban serta membentuk perilaku yang bertanggung jawab. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di SMA Cendrawasih 1 Jakarta dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bagaimana prinsip-prinsip sanksi hukum diterapkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat di sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan memahami peran sanksi sebagai bentuk pengendalian sosial, mengenali konsekuensi dari pelanggaran aturan sekolah, serta menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi norma hukum. Metode kegiatan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana agar siswa memperoleh gambaran konkret mengenai penerapan sanksi dalam dinamika kehidupan sekolah.

Kata Kunci: kesadaran hukum, sanksi hukum, disiplin sekolah, perilaku siswa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Abstract:

Legal education is an important preventive measure to build legal awareness from an early age, especially in schools as part of the educational community. One of the topics that high school students need to understand is the application of sanctions in daily interactions at school, which serve to maintain order and shape responsible behavior. This Community Service Program (PkM) was implemented at Cendrawasih 1 High School in Jakarta with the aim of providing students with an understanding of how the principles of legal sanctions are applied in the context of community life at school. Through this activity, students are expected to understand the role of sanctions as a form of social control, recognize the consequences of violating school rules, and develop an awareness of the need to comply with legal norms. The methods used in this activity included counseling, interactive discussions, and simple case studies so that students could gain a concrete picture of the application of sanctions in the dynamics of school life.

Keywords: *legal awareness, legal sanctions, school discipline, student behavior*



PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam pembentukan karakter warga negara yang taat aturan dan bertanggung jawab. Pada level sekolah menengah atas, pendidikan mengenai sanksi dan tata tertib menjadi sangat strategis untuk menyiapkan generasi muda yang mampu memahami konsekuensi hukum maupun sosial dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Siswa SMA berada dalam fase perkembangan sosial dan moral yang cepat, sehingga pemahaman tentang aturan, norma, dan sanksi perlu ditanamkan melalui pendidikan formal, nonformal, maupun kegiatan penyuluhan. Penerapan sanksi tidak hanya hadir dalam konteks hukum nasional, tetapi juga dalam bentuk sanksi sosial di masyarakat serta sanksi kedisiplinan di lingkungan sekolah. Ketiga aspek ini membentuk sistem pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks sekolah, sanksi kedisiplinan memiliki peran penting untuk membentuk perilaku siswa menjadi lebih teratur dan bertanggung jawab. Miarsa et al. (2024) menjelaskan bahwa sanksi disiplin di sekolah berfungsi sebagai instrumen pendidikan, bukan sekadar hukuman, melainkan sebagai upaya pembinaan agar siswa memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Guru sebagai pelaksana disiplin memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menerapkan sanksi secara proporsional, adil, dan sesuai pedoman hukum pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin yang baik harus mengacu pada prinsip legalitas dan perlindungan hak siswa, sehingga dapat menghindarkan praktik hukuman yang tidak sesuai standar pendidikan.

Selaras dengan itu, Lisnawati et al. (2023) menegaskan bahwa mekanisme pendisiplinan siswa di SMA memerlukan sistem tata tertib yang jelas dan terstruktur. Sekolah yang berhasil menerapkan tata tertib biasanya memiliki prosedur penegakan aturan yang konsisten dan transparan. Hal ini mencakup komunikasi aturan kepada

seluruh warga sekolah, pencatatan pelanggaran, serta mekanisme eskalasi sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran. Penelitian tersebut menekankan bahwa kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh pemberian sanksi, tetapi juga oleh pemahaman siswa mengenai tujuan aturan tersebut. Semakin siswa memahami makna aturan, semakin kuat kesadaran mereka untuk menaati norma.

Dari perspektif psikologis dan pembinaan perilaku, disiplin siswa juga berkaitan erat dengan layanan bimbingan konseling. Fiana et al. (2023) menyatakan bahwa peran konselor sangat dibutuhkan dalam menangani perilaku indisipliner siswa dan membantu mereka memahami dampak sosial, akademik, maupun psikologis dari tindakan yang melanggar aturan. Studi tersebut menekankan bahwa bimbingan konseling dapat menjadi jembatan antara aturan dan perilaku siswa, melalui pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif. Dengan demikian, penegakan sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif.

Pemahaman tentang sanksi juga dapat diperluas melalui analisis penegakan disiplin di institusi pendidikan berbasis hukum yang lebih ketat. Ipdukilpli et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara, mekanisme sanksi diterapkan dengan standar disiplin tinggi, mencakup pengawasan ketat, prosedur hukum internal, dan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Meskipun konteksnya berbeda dengan sekolah umum, studi ini memberikan gambaran bagaimana sanksi yang tegas namun terstruktur dapat membentuk karakter disipliner peserta didik dalam jangka panjang. Pembelajaran dari kasus ini dapat diadaptasi secara proporsional dalam konteks sekolah umum untuk memperkuat budaya tertib dan patuh aturan.

Kajian kebijakan pendidikan juga menunjukkan bahwa penegakan disiplin memerlukan dukungan manajemen sekolah dan kebijakan yang jelas. Hasanah et al. (2025) mengungkap



bahwa implementasi kebijakan disiplin di sekolah dasar saja membutuhkan sinkronisasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Pembelajaran dari penelitian ini relevan bagi SMA karena menunjukkan bahwa disiplin yang efektif bukan hanya hasil pemberian sanksi, tetapi juga keterlibatan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum siswa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam budaya sekolah.

Melihat temuan dari berbagai penelitian tersebut, penyuluhan hukum mengenai penerapan sanksi menjadi kebutuhan penting bagi siswa SMA. Penyuluhan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai sanksi hukum formal, tetapi juga membuka wawasan siswa mengenai sanksi sosial dan sanksi kedisiplinan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Melalui edukasi yang komprehensif dan kontekstual, siswa dapat memahami hubungan antara aturan, pelanggaran, dan konsekuensi, sehingga terbentuk kesadaran hukum yang kuat. Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Cendrawasih 1 Jakarta ini menjadi salah satu bentuk intervensi edukatif untuk meningkatkan literasi hukum siswa sekaligus memperkuat karakter disiplin mereka dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Persiapan dan Koordinasi

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim penyuluhan melakukan koordinasi dengan pihak SMA Cendrawasih 1 Jakarta untuk menentukan jadwal pelaksanaan, jumlah peserta, serta cakupan materi yang akan diberikan. Pada tahap ini, tim juga menyusun bahan presentasi, termasuk materi mengenai aturan, tata tertib, serta bentuk-bentuk sanksi dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan sekolah. Persiapan ini bertujuan agar penyuluhan berjalan efektif, sesuai kebutuhan siswa, dan relevan dengan kondisi sosial di lingkungan sekolah.

2. Penyuluhan Hukum: Penerapan Sanksi dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kegiatan inti berupa penyampaian materi mengenai pentingnya memahami aturan hukum dan penerapan sanksi sebagai bagian dari pembinaan perilaku masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup antara lain:

- Konsep dasar kesadaran hukum bagi pelajar
- Jenis-jenis pelanggaran yang umum terjadi pada remaja dan konsekuensinya
- Penerapan sanksi administratif, sosial, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
- Relevansi tata tertib sekolah sebagai bentuk penegakan aturan di lingkungan Pendidikan
- Contoh kasus sederhana yang berkaitan dengan perilaku disiplin dan sanksi

Materi disampaikan secara interaktif melalui presentasi, contoh kasus, dan penjelasan kontekstual agar siswa lebih mudah memahami pentingnya menaati aturan serta tujuan diberlakukannya sanksi dalam menjaga ketertiban social

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi akhir, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan tanya jawab. Para siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan seputar asas hukum pidana maupun kasus-kasus yang relevan dengan kehidupan remaja. Selain itu, mereka juga diperkenalkan secara singkat mengenai STIH Adhyaksa dan peluang melanjutkan Pendidikan hukum di perguruan tinggi. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa serta mendorong mereka untuk berpikir kritis dan aktif dalam menyikapi isu-isu hukum di lingkungan sekitar mereka.



HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Penerapan Sanksi dalam Kehidupan Bermasyarakat yang dilaksanakan di SMA Cendrawasih 1 Jakarta berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari para siswa. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari perhatian mereka terhadap materi yang disampaikan serta banyaknya pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa isu mengenai kedisiplinan, tata tertib, serta penerapan sanksi merupakan topik yang dekat dengan kehidupan remaja dan relevan dengan kebutuhan pembinaan karakter di sekolah.



Pada tahap pemaparan materi, siswa memperoleh pemahaman mendasar tentang pentingnya hukum dan fungsi sanksi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Materi yang disampaikan menekankan bahwa sanksi tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan berfungsi sebagai upaya pembinaan agar seseorang memahami batasan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Pemaparan ini sejalan dengan temuan Miarsa et al. (2024) yang menekankan bahwa penerapan sanksi disiplin dalam lingkungan pendidikan berperan penting untuk membentuk perilaku siswa agar lebih tertib dan bertanggung jawab. Siswa juga dikenalkan pada berbagai jenis sanksi, mulai dari sanksi administratif, sosial, hingga konsekuensi hukum yang

mungkin timbul akibat pelanggaran tertentu.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai tata tertib sekolah dan mekanisme penegakan disiplin mendapatkan perhatian khusus. Hal ini relevan dengan penelitian Lisnawati et al. (2023), yang menyatakan bahwa kedisiplinan siswa dapat terbangun apabila sekolah memiliki mekanisme pembinaan yang jelas dan konsisten dalam menerapkan aturan. Melalui contoh kasus sederhana yang disesuaikan dengan situasi sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan memahami alasan setiap sanksi diberlakukan.

Sesi diskusi semakin memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya kesadaran hukum. Banyak peserta yang menanyakan tentang tindakan-tindakan tertentu yang sering muncul di lingkungan remaja, seperti perundungan, pelanggaran tata tertib, hingga penggunaan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mulai mampu menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi mereka. Temuan ini konsisten dengan Fiana et al. (2023), yang menekankan bahwa disiplin siswa dapat ditingkatkan ketika mereka memiliki ruang dialog dan bimbingan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.



Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa mengenai penerapan sanksi, fungsi aturan, serta pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan siswa dapat menerapkan perilaku yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam



menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Penerapan Sanksi dalam Kehidupan Bermasyarakat” di SMA Cendrawasih 1 Jakarta terbukti memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Melalui pemaparan materi, diskusi, dan pembahasan kasus, siswa memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fungsi sanksi sebagai sarana pembinaan untuk menciptakan ketertiban, bukan sebagai bentuk hukuman semata. Pemahaman ini membantu siswa melihat bahwa aturan dan sanksi merupakan bagian penting dalam menjaga keteraturan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kegiatan ini juga mengungkap bahwa siswa membutuhkan penjelasan yang sistematis mengenai tata tertib serta konsekuensi dari setiap bentuk pelanggaran. Penyuluhan yang dilakukan secara interaktif memungkinkan siswa menghubungkan materi dengan situasi nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku di sekolah, kedisiplinan, dan interaksi sosial. Hal ini membuat mereka lebih mudah memahami tujuan diberlakukannya aturan dan pentingnya kepatuhan.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini berhasil meningkatkan wawasan hukum siswa dan mendorong terbentuknya sikap disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran untuk berperilaku sesuai norma. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai penerapan sanksi dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan para siswa dapat berkontribusi menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib, aman, dan harmonis, sekaligus membawa nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan mereka di luar sekolah.

REFERENSI

Fiana, F. J., Daharnis, & Ridha, M. (2023). Disiplin siswa di sekolah

dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor. <https://doi.org/10.24036/02013231733-0-00>

Hasanah, D. P., Hafifah, H., Nada, S. B. K., Kartika, W. Y., & Sakban, S. (2025). Implementation of policies to enforce discipline among teachers and students at Muhammadiyah 5 Elementary School, Pekanbaru. ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan, 3(3), 126–137. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v3i3.1606>

Ipdulkipli, I., Madiong, B., & Oner, B. (2023). Analisis hukum penegakan pelanggaran disiplin terhadap siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 163–171. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3831>

Lisnawati, N., Martono, N., & Puspitasari, E. (2023). Mekanisme pendisiplinan siswa di SMA dalam penegakan tata tertib sekolah. Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan, 6(3). <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i3.2595>

Miarsa, F. R. D., Santoso, H. A., Amalia, T., & Saputra, B. (2024). Legal analysis of disciplinary sanctions by teachers to students at school. ANAYASA: Journal of Legal Studies, 1(2), 196–211. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.243>